



Analisis Aspek Keberlanjutan terhadap Implementasi Tata Kelola yang Baik: Studi Kasus PT ABC

Wahyuning Slamet^{1*}, Elvia R. Shauki²

Universitas Indonesia, Indonesia

Email: wahyuningslamet@gmail.com^{1*}, elvia.shauki@outlook.com²

Keywords:

ASEAN Corporate Governance Scorecard, compliance theory, corporate governance, legitimacy theory, sustainability

Kata kunci: ASEAN Corporate Governance Scorecard, keberlanjutan, tata kelola perusahaan, teori kepatuhan, teori legitimasi

Abstract

Sustainability has become a component of the ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) version March 2024. If companies do not adequately disclose sustainability aspects, the inclusion of sustainability as a scoring component on the ACGS lowers the score on Section B and the total corporate governance assessment score, indicating a decline in good governance practices. This research aims to analyze the compliance over sustainability disclosure in Indonesian mining company and the reasons for non-compliance with the ACGS. This study uses compliance and legitimacy theories to explain the causes of non-compliance and the motivation for sustainability disclosure. This study employs a qualitative approach with a case study design on PT ABC. Secondary data were used to calculate sustainability disclosure scores using Section B of the ACGS (version 2024). The results of content analysis of the data, along with interview results from company management, were used to analyze the differences between current disclosures and ideal disclosures based on Section B of the ACGS and the cause of those differences. The findings indicate that PT ABC has not fully met the ideal disclosure requirements based on Section B of the ACGS, including the minimum disclosures at Level 1. PT ABC complies with 93% of the total disclosures in the ACGS Section B. Non-compliance with disclosures based on the ACGS Section B occurs in question B.6.3 at Level 1, and penalty question (P)B.1.1 at Level 2. The non-compliance were due to the undisclosed information is non-mandatory disclosure under Indonesian regulation, and is commercially sensitive information.

Abstrak

Keberlanjutan menjadi salah satu komponen penilaian tata kelola perusahaan pada ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) versi 2 Maret 2024. Jika perusahaan kurang melakukan pengungkapan aspek keberlanjutan, masuknya keberlanjutan sebagai salah satu komponen penilaian pada ACGS menurunkan skor pada Bagian B dan total skor penilaian tata kelola perusahaan dan menunjukkan penurunan dalam penerapan tata kelola yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepatuhan pengungkapan aspek keberlanjutan pada perusahaan pertambangan di Indonesia dan penyebab ketidakpatuhan terhadap ACGS. Penelitian ini menggunakan teori kepatuhan dan teori legitimasi untuk menjelaskan penyebab ketidakpatuhan dan alasan pengungkapan aspek keberlanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus pada PT ABC. Data sekunder digunakan untuk menghitung skor pengungkapan aspek keberlanjutan menggunakan Bagian B – Keberlanjutan dan Ketahanan dari ACGS (versi 2024). Hasil analisis konten dari data tersebut dan transkrip wawancara dengan manajemen perusahaan digunakan untuk menganalisis perbedaan antara pengungkapan yang telah dilakukan dengan pengungkapan ideal berdasarkan ACGS Bagian B dan penyebab perbedaan tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT ABC belum

sepenuhnya memenuhi pengungkapan ideal berdasarkan ACGS Bagian B, termasuk pengungkapan minimum berdasarkan Level 1. PT ABC mematuhi 93% dari total pengungkapan pada ACGS Bagian B. Ketidakpatuhan terhadap pengungkapan berdasarkan ACGS Bagian B terjadi pada pertanyaan B.6.3 pada Level 1, dan pertanyaan penalti (P)B.1.1 pada Level 2. Ketidakpatuhan tersebut disebabkan karena informasi yang tidak diungkapkan merupakan informasi yang tidak wajib diungkapkan berdasarkan regulasi yang berlaku di Indonesia, dan merupakan informasi yang bersifat commercially sensitive.

PENDAHULUAN

Keberlanjutan (sustainability) didefinisikan sebagai pemenuhan kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan di masa depan (Imperatives, 1987). Keberlanjutan dijabarkan menjadi tiga dimensi keberlanjutan yang terdiri dari dimensi sosial, lingkungan, dan ekonomi (Purvis et al., 2019) dan digambarkan sebagai tiga lingkaran yang saling berpotongan dengan keberlanjutan secara keseluruhan di pusatnya (Barbier, 1987) sebagai pencapaian tujuan dari tiga dimensi tersebut. Ketiga dimensi tersebut dibagi ke dalam lima pilar, yaitu people, planet, prosperity, peace dan partnership ketika PBB meluncurkan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2015 (UN General Assembly, 2022). Tata kelola perusahaan yang baik berperan penting dalam mencapai tujuan keberlanjutan. Tata kelola perusahaan meningkatkan kinerja finansial dan komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan (Correa-Mejía et al., 2024). Tata kelola berkelanjutan (sustainable governance) memberikan nilai tambah kepada masyarakat sebagai pemangku kepentingan (Leal Filho et al., 2016).

Keberlanjutan menjadi salah satu dari beberapa indikator penilaian tata kelola perusahaan. Hasil penelitian Buchetti et al., (2024) menunjukkan bahwa Komite Keberlanjutan merupakan salah satu indikator tata kelola perusahaan yang digunakan untuk mengukur kinerja ekonomi, sosial dan tata kelola (ESG). Namun, tidak seluruh penilaian tata kelola perusahaan yang dilakukan oleh lembaga internasional menggunakan keberlanjutan sebagai indikator penilaian tata kelola perusahaan. Contohnya Corporate Governance Watch dan Reports on the Observance of Standards and Codes (ROSC) yang belum memasukkan keberlanjutan sebagai indikator penilaian tata kelola perusahaan pada tahun 2023 (ACGA, 2023) (PEFA, 2023). Di sisi lain, keberlanjutan sudah termasuk sebagai salah satu prinsip tata kelola perusahaan pada G20/OECD Principles of Corporate Governance 2023 dan ICGN Global Governance Principles 2021 (OECD, 2023; Principles, 2021) serta menjadi komponen penilaian tata kelola perusahaan pada ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS).

Pentingnya aspek keberlanjutan dalam implementasi tata kelola perusahaan yang baik mendorong Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) menambahkan keberlanjutan sebagai salah satu prinsip tata kelola perusahaan (OECD, 2023). OECD memasukkan aspek keberlanjutan dan ketahanan sebagai prinsip VI pada G20/OECD Principles of Corporate Governance versi 2023. Hal ini mendorong perubahan indikator penilaian tata kelola perusahaan yang menggunakan G20/OECD Principles of Corporate Governance sebagai acuan, yaitu ACGS. ACGS menambahkan aspek keberlanjutan sebagai salah satu kriteria penilaian tata kelola perusahaan. Revisi terbaru ACGS (versi 2 Maret 2024) menambahkan keberlanjutan dan ketahanan sebagai Bagian B dari ACGS.

ACGS merupakan salah satu dari tiga alat penilaian terhadap praktik tata kelola perusahaan di Indonesia yang dilakukan oleh lembaga internasional (OJK, 2014). Diluncurkan sejak tahun 2011 oleh ASEAN Capital Market Forum (ACMF) (ACMF, 2024), ACGS menjadi alat penilai praktik tata kelola perusahaan publik di negara-negara ASEAN. ACGS digunakan untuk mengevaluasi implementasi tata kelola perusahaan di Indonesia dengan cara membandingkan dengan praktik tata kelola perusahaan yang direkomendasikan secara internasional menggunakan informasi yang tersedia di publik dan membandingkannya dengan praktik tata kelola perusahaan di enam negara ASEAN, yaitu Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam (ACMF, 2022). ACGS dapat meningkatkan efektivitas dari praktik tata kelola perusahaan, meningkatkan visibilitas dan daya tarik perusahaan di mata investor global, dan berkontribusi terhadap pengembangan dan keberlanjutan ekonomi regional di ASEAN. Masuknya keberlanjutan ke dalam komponen penilaian ACGS (Bagian B pada versi 2024) menunjukkan bahwa ACGS dapat digunakan untuk mengevaluasi aspek keberlanjutan dalam praktik tata kelola perusahaan di Indonesia.

Beberapa peneliti menggunakan ACGS untuk menilai tata kelola perusahaan. Apsari & Puspita (2023), Ilyasa & Nurkholis (2023), Hamonangan & Hermawan (2020), dan Panangian & Sudarma (2022) menggunakan ACGS untuk menilai implementasi tata kelola pada perusahaan di bidang telekomunikasi, properti, dan manufaktur, sementara Karina & Weli (2020) menggunakan ACGS untuk menilai tata kelola pada beberapa perusahaan manufaktur. Penilaian tersebut hanya terbatas pada perhitungan skor atas jawaban dari pertanyaan dari ACGS bagian A-E. Selain itu, penelitian tersebut masih menggunakan ACGS versi 2017 atau sebelumnya yang belum termasuk pengungkapan aspek keberlanjutan. Penelitian terkait pengungkapan aspek keberlanjutan pada perusahaan tambang di Indonesia dilakukan oleh Harahap et al. (2020), namun penelitian tersebut menggunakan GRI sebagai instrumen penilaian pengungkapan aspek keberlanjutan. Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini menggunakan Bagian B dari ACGS terbaru (versi 2024) untuk menganalisis pengungkapan aspek keberlanjutan pada perusahaan pertambangan di Indonesia.

Penilaian tata kelola perusahaan di Indonesia menggunakan ACGS versi 2017 dan sebelumnya (belum termasuk pertanyaan baru pada bagian keberlanjutan dan ketahanan) menunjukkan bahwa ACGS tidak berpengaruh pada pelaporan terkait aspek berkelanjutan. Hasil penelitian Caronge et al. (2023), dan Husnaini & Basuki (2020) menemukan bahwa ACGS tidak berpengaruh terhadap pelaporan berkelanjutan. Hal tersebut bertentangan dengan hasil penelitian di luar Indonesia yang menemukan bahwa tata kelola perusahaan yang baik berpengaruh positif terhadap pengungkapan keberlanjutan (Hussain et al., 2018; Mahmood et al., 2018). Inkonsistensi tersebut disebabkan implementasi ACGS bersifat sukarela dan relatif masih baru di Indonesia, dan kurangnya pengungkapan aspek keberlanjutan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Karena itu, masuknya aspek keberlanjutan sebagai indikator tata kelola perusahaan pada ACGS diharapkan dapat meningkatkan pengungkapan aspek keberlanjutan dan praktik tata kelola perusahaan yang baik di Indonesia.

Pengungkapan aspek keberlanjutan dapat menjadi tantangan bagi perusahaan di Indonesia, terutama perusahaan yang memiliki dampak signifikan terhadap aspek keberlanjutan. Pengungkapan aspek keberlanjutan pada perusahaan di Indonesia dipengaruhi oleh ukuran perusahaan dan tipe industri (Widiastuti et al., 2018). Pengungkapan aspek keberlanjutan pada perusahaan yang berada di industri high profile lebih banyak dibandingkan

dengan perusahaan di industri low profile. Industri pertambangan merupakan salah satu contoh industri high profile karena melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan berdampak signifikan terhadap masyarakat dan lingkungan.

Walaupun kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan di industri pertambangan penting bagi kesejahteraan manusia dan perekonomian, kegiatan tersebut memiliki tantangan dan risiko yang kritis bagi keberlanjutan (UNDP and UN Environment, 2018). Dampak kegiatan pertambangan terhadap aspek keberlanjutan meliputi seluruh siklus hidup tambang, mulai dari kegiatan eksplorasi hingga penutupan tambang. Dampak signifikan dari kegiatan pertambangan mendorong pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai peraturan untuk meminimalkan dampak kegiatan pertambangan terhadap keberlanjutan. Contohnya adalah UU Nomor 32 Tahun 2009 yang mewajibkan perusahaan untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Signifikansi dari dampak pertambangan terhadap keberlanjutan memengaruhi pengungkapan aspek keberlanjutan bagi perusahaan pertambangan. Perusahaan pertambangan memiliki dampak negatif terhadap keberlanjutan, terutama pada dimensi lingkungan (UNDP and UN Environment, 2018). Perusahaan pertambangan mempunyai kinerja keberlanjutan yang buruk (terutama pada aspek lingkungan) jika tidak mengelola dan mengurangi dampak negatif tersebut. Kinerja keberlanjutan yang buruk pada aspek lingkungan berdampak negatif pada pengungkapan terkait aspek lingkungan (Solikhah et al., 2021). Hasil penelitian Harahap et al. (2020) menyatakan bahwa perusahaan pertambangan di Indonesia tidak sepenuhnya memenuhi pengungkapan minimum berdasarkan standar pelaporan keberlanjutan. Hal ini menunjukkan kurangnya pengungkapan terhadap aspek keberlanjutan pada laporan keberlanjutan atau laporan tahunan oleh perusahaan pertambangan di Indonesia.

Kurangnya pengungkapan aspek keberlanjutan juga terjadi pada PT ABC. PT ABC merupakan perusahaan pertambangan minyak dan gas di Indonesia dan menjalankan kegiatan usaha mulai dari eksplorasi minyak dan gas bumi di Indonesia hingga pemasaran dan penjualan produk BBM dan gas ke konsumen akhir. Hasil penelitian Harahap et al. (2020) di atas selaras dengan hasil penelitian dari Purwanti & Lestari (2021) pada tahun 2017 dan 2018 dengan menggunakan Sustainability Report Disclosure Indeks (SRDI). Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa pengungkapan keberlanjutan yang dilakukan oleh PT ABC termasuk dalam kategori “kurang lengkap” dan hanya mengungkapkan kurang dari 40% total item yang seharusnya diungkapkan. Kedua penelitian tersebut hanya menggunakan data sekunder untuk menilai kelengkapan pengungkapan keberlanjutan yang dilakukan oleh PT ABC. Berbeda dengan kedua penelitian tersebut, penelitian ini menggunakan Bagian B dari ACGS versi terbaru sebagai instrumen penilaian pengungkapan aspek keberlanjutan. Selain itu, penelitian ini menggunakan data sekunder dan data primer dari hasil wawancara untuk menilai pengungkapan keberlanjutan yang dilakukan oleh PT ABC pada tahun 2024.

Kurangnya pengungkapan keberlanjutan berdampak negatif terhadap total skor pada ACGS Bagian B: Keberlanjutan dan Ketahanan. Total skor pada ACGS Bagian B menunjukkan upaya perusahaan menjalankan praktik tata kelola dengan mengintegrasikan faktor lingkungan dan sosial, serta memperhatikan keberlangsungan perusahaan dalam jangka panjang. Selain itu, total skor juga menunjukkan kepatuhan perusahaan terhadap penerapan tata kelola yang baik. Penurunan skor pada ACGS mengindikasikan penurunan penerapan tata kelola yang baik dan menurunkan kepercayaan investor. Penelitian ini menganalisis

kepatuhan PT ABC terhadap pengungkapan aspek keberlanjutan. ACGS Bagian B: Keberlanjutan dan Ketahanan digunakan sebagai instrumen penilaian pengungkapan aspek keberlanjutan. Selain itu, penelitian menganalisis perbedaan antara pengungkapan aspek keberlanjutan yang telah dilakukan oleh PT ABC dan pengungkapan ideal berdasarkan ACGS. Perbedaan tersebut diperoleh dari analisis atas pertanyaan yang mendapatkan skor 0 pada Level 1 dan pertanyaan bonus pada Level 2, dan pertanyaan yang mendapatkan skor penalti -1 pada pertanyaan penalti pada Level 2. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus jenis evaluasi. Penelitian ini menggunakan teori kepatuhan dalam menjelaskan kepatuhan PT ABC terhadap pengungkapan keberlanjutan berdasarkan ACGS. Penelitian ini juga menggunakan teori legitimasi dalam menjelaskan upaya PT ABC menggunakan pengungkapan aspek keberlanjutan untuk memperoleh dan mempertahankan legitimasi perusahaan di mata para pemangku kepentingan. Hasil penelitian ini memberikan gambaran pengungkapan aspek keberlanjutan pada perusahaan pertambangan di Indonesia dan penyebab ketidakpatuhan terhadap pengungkapan aspek keberlanjutan berdasarkan ACGS Bagian B.

METODE PENELITIAN

Strategi dan Pendekatan Penelitian

Strategi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus dengan jenis evaluasi. Studi kasus merupakan strategi penelitian yang bertujuan untuk melakukan eksplorasi mendalam terhadap suatu fenomena atau objek penelitian tertentu melalui pengumpulan data secara komprehensif dengan memanfaatkan berbagai teknik dalam periode waktu yang telah ditetapkan (Yin, 2018). Terdapat tiga jenis studi kasus menurut Ellet (2018), yaitu *evaluation* (menganalisis dan menilai fenomena yang diteliti), *problem solving* (mengidentifikasi dan memahami akar masalah), dan *decision making* (merekomendasikan keputusan dari masalah yang diteliti). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepatuhan terhadap pengungkapan keberlanjutan pada PT ABC (perusahaan tambang di Indonesia) berdasarkan Bagian B dari ACGS (versi 2024). Oleh karena itu, studi kasus dengan tipe evaluasi dipilih sebagai strategi yang digunakan pada penelitian ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (*qualitative methods*). Creswell & Creswell (2018) mendefinisikan pendekatan kualitatif sebagai pendekatan untuk melakukan eksplorasi dan memberikan pemahaman atas makna yang diberikan oleh individu atau kelompok tertentu terhadap suatu masalah. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh pemahaman mendalam dan komprehensif atas pengungkapan yang telah dilakukan oleh perusahaan pertambangan di Indonesia serta perbedaan antara pengungkapan tersebut dengan pengungkapan ideal berdasarkan ACGS.

Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data sekunder yang digunakan untuk menilai kepatuhan terhadap pengungkapan aspek keberlanjutan menggunakan ACGS Bagian B. Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini hanya terbatas pada data yang dapat diakses oleh publik (laporan tahunan, laporan keberlanjutan, dan informasi lainnya yang terdapat pada situs web perusahaan). Data primer diperoleh dari hasil wawancara dan digunakan untuk menganalisis penyebab ketidakpatuhan terhadap pengungkapan aspek keberlanjutan berdasarkan ACGS. Pertanyaan wawancara dikembangkan dari pertanyaan

ACGS yang mendapatkan skor 0 pada level 1, dan pertanyaan bonus (level 2), serta skor -1 pada pertanyaan penalti (level 2). Wawancara dilakukan dengan narasumber Senior Supervisor dari Fungsi Sustainability Finance di PT ABC. Narasumber tersebut dipilih karena memiliki pengetahuan yang mencukupi terkait dengan kebijakan, program, dan pelaporan keberlanjutan di PT ABC. Wawancara dilakukan menggunakan metode semi terstruktur sehingga memungkinkan pewawancara mengajukan pertanyaan tambahan dari hasil penjelasan narasumber. Transkrip hasil wawancara dengan narasumber dianalisis untuk menemukan pola yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Penelitian ini menggunakan triangulasi data (data triangulation). Triangulasi merupakan metode campuran yang digunakan untuk menggabungkan data untuk memastikan temuan penelitian dari satu metode menguatkan temuan dari metode lainnya (Saunders et al., 2019). Triangulasi dilakukan untuk memastikan validitas dan reliabilitas dalam penelitian kuantitatif. Penelitian ini menggabungkan data kualitatif yang diperoleh dari analisis dokumen dengan wawancara semi terstruktur. Hasil analisis dokumen sekunder digunakan untuk mengevaluasi pengungkapan aspek keberlanjutan yang dilakukan oleh PT ABC. Di sisi lain, wawancara dilakukan untuk melakukan validasi atas temuan dari hasil analisis dokumen. Wawancara dilakukan untuk memastikan kekurangan pengungkapan pada pertanyaan yang mendapatkan skor 0 atau -1, serta mengetahui penyebabnya. Penggabungan hasil analisis dokumen dan wawancara dilakukan untuk menghindari bias dan menguatkan temuan penelitian.

Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan dan analisis data pada penelitian ini dibagi menjadi dua tahapan. Tahap pertama adalah perhitungan skor ACGS Bagian B. Tahap tersebut menjawab pertanyaan penelitian pertama terkait pengungkapan keberlanjutan yang telah dilakukan oleh perusahaan pertambangan di Indonesia. Tahap kedua adalah gap analysis. Analisis tersebut dilakukan untuk mencari perbedaan antara pengungkapan yang telah dilakukan oleh perusahaan tambang di Indonesia dan pengungkapan ideal berdasarkan ACGS Bagian B.

Teknik analisis konten digunakan untuk menganalisis data pada penelitian ini. Analisis konten (content analysis) adalah teknik analisis khusus untuk membuat kategori dan kode dari teks, suara, dan data visual menggunakan skema pengodean sistematis untuk memungkinkan analisis kuantitatif (Saunders et al., 2019). Pada tahap pertama, pencarian kata pada dokumen digunakan untuk mencari kata kunci. Kata kunci dirumuskan dari pertanyaan pada ACGS Bagian B. Pengungkapan pada bagian dokumen yang memuat kata kunci dinilai apakah pengungkapan tersebut menunjukkan praktik tata kelola yang baik sesuai ACGS Bagian B. Dari hasil penilaian tersebut, skor diberikan untuk masing-masing pertanyaan. Perhitungan total skor dilakukan dengan menjumlah skor dari seluruh pertanyaan pada ACGS Bagian B pada Level 1 (22 pertanyaan) dan pertanyaan terkait keberlanjutan pada Level 2 (7 pertanyaan bonus dan 3 pertanyaan penalti). Masing-masing pertanyaan pada level 1 dan pertanyaan bonus mendapatkan skor 1 jika memenuhi kriteria praktik tata kelola yang baik sesuai yang disebutkan dalam pertanyaan tersebut dan skor 0 jika sebaliknya. Skor -1 pada pertanyaan penalti diberikan jika perusahaan tidak memenuhi kriteria praktik tata kelola yang baik.

Pada tahap kedua, analisis konten digunakan untuk menganalisis transkrip hasil wawancara. Penjelasan terkait penyebab pengungkapan aspek keberlanjutan tidak sesuai dengan ACGS dikelompokkan ke masing-masing pertanyaan. Dari penjelasan untuk masing-

masing pertanyaan tersebut, kata kunci terkait penyebab ketidaksesuaian pengungkapan aspek keberlanjutan dicari dan dirumuskan. Melalui analisis konten, makna dari hasil wawancara diidentifikasi berdasarkan kata kunci dan frekuensi kata yang disampaikan oleh narasumber. Hasil analisis konten diinterpretasikan untuk menjawab masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengungkapan aspek keberlanjutan pada PT ABC

PT ABC mendapatkan skor 27 dari hasil perhitungan skor ACGS Bagian B. Skor ini menunjukkan bahwa PT ABC memenuhi lebih dari 93% pengungkapan terkait aspek keberlanjutan yang diharuskan dari 32 pertanyaan pada ACGS Bagian B. Tabel hasil perhitungan skor ACGS Bagian B disajikan pada Tabel 1. Hasil perhitungan skor juga menunjukkan bahwa PT ABC tidak sepenuhnya melakukan pengungkapan aspek keberlanjutan yang sesuai dengan ACGS Bagian B pada 2 pertanyaan. Pada pertanyaan level 1, PT ABC mendapatkan skor 21. Hal ini menunjukkan bahwa PT ABC telah memenuhi pengungkapan aspek keberlanjutan pada 21 pertanyaan, namun belum memenuhi pengungkapan aspek keberlanjutan pada 1 pertanyaan, yaitu pertanyaan B.6.3. PT ABC mendapatkan skor 7 pada pertanyaan bonus di level 2. Hal ini menunjukkan bahwa PT ABC memenuhi seluruh pengungkapan aspek keberlanjutan pada 7 pertanyaan bonus. Skor ini juga menunjukkan upaya perusahaan untuk melakukan pengungkapan yang melebihi standar minimum yang diharapkan oleh ACGS (Level 1). Di sisi lain, PT ABC mendapatkan penalti (skor -1) dari 1 pertanyaan dari total 3 pertanyaan penalti di level 2.

Tabel 1. Hasil Perhitungan Skor ACGS Bagian B

Pertanyaan	Skor PT ABC
Level 1	21
Bonus	7
Penalti	-1
Total skor	27

Sumber: Data sekunder diolah berdasarkan ASEAN Corporate Governance Scorecard Bagian B

Berdasarkan hasil perhitungan skor, PT ABC belum sepenuhnya mematuhi pengungkapan aspek keberlanjutan sesuai dengan pengungkapan ideal berdasarkan ACGS Bagian B. PT ABC telah memenuhi 93% dari seluruh pengungkapan yang ideal sesuai ACGS. Hal ini juga menunjukkan bahwa PT ABC telah sangat baik dalam mengungkapkan aspek keberlanjutan pada tahun 2024. Walaupun ACGS bersifat sukarela dan tidak terdapat sanksi dari regulator jika perusahaan tidak melakukan pengungkapan aspek keberlanjutan sesuai ACGS, PT ABC telah sebagian besar pengungkapan aspek keberlanjutan sesuai dengan ACGS. Hal ini juga mengindikasikan bahwa kepatuhan PT ABC terhadap ACGS. Hasil ini juga mengindikasikan bahwa PT ABC telah implementasi praktik tata kelola perusahaan yang baik, dari segi pengungkapan aspek keberlanjutan.

Dibandingkan dengan hasil penelitian dari Purwanti & Lestari (2021), hasil perhitungan skor menunjukkan adanya peningkatan pengungkapan aspek keberlanjutan. Hasil perhitungan skor ACGS Bagian B menunjukkan PT ABC mematuhi pengungkapan pada 21

pertanyaan dari total 22 pertanyaan (memenuhi 95%). Hal ini menunjukkan bahwa PT ABC lebih baik dalam melakukan pengungkapan aspek keberlanjutan pada tahun 2024 jika dibandingkan pada tahun 2017 dan 2018. Hasil penelitian Purwanti & Lestari (2021) tersebut menyimpulkan bahwa PT ABC tidak melakukan pengungkapan keberlanjutan secara lengkap pada laporan keberlanjutan. Pengungkapan aspek keberlanjutan pada tahun 2017 dan 2018 hanya memenuhi kurang dari 40% pengungkapan berdasarkan Sustainability Report Disclosure Index.

Peningkatan pengungkapan aspek keberlanjutan pada PT ABC disebabkan karena adanya upaya perusahaan untuk meningkatkan transparansi dan kualitas laporan keberlanjutan. Upaya tersebut terdiri dari kegiatan refreshment, pelibatan akademisi, dan review internal. Pada awal periode pelaporan, tim yang menyusun laporan keberlanjutan PT ABC melakukan kegiatan refreshment untuk merumuskan isu-isu penting yang harus dibahas pada laporan keberlanjutan dari masing-masing unit kerja di PT ABC. PT ABC juga melibatkan akademisi dalam penyusunan laporan keberlanjutan. Akademisi berperan dalam memberikan saran dalam penyusunan laporan keberlanjutan. Selain itu, PT ABC juga melakukan review internal di akhir periode pelaporan. Review internal dilakukan untuk melakukan perbaikan pada laporan keberlanjutan dengan meninjau informasi yang diungkapkan pada tahun sebelumnya, dan memastikan laporan keberlanjutan yang disusun lebih baik dari laporan tahun sebelumnya. Dari hasil review tersebut, PT ABC dapat melakukan penyajian ulang (restatement) pada laporan sebelumnya untuk mengoreksi pada laporan sebelumnya.

Di PT ABC, kita biasa melakukan semacam refreshment kepada tim yang ditunjuk untuk membuat sustainability report di tahun tersebut. Dari refreshment tersebut akan didapatkan isu-isu penting yang menurut masing-masing fungsi ini perlu digali lebih dalam pada saat proses pembuatan sustainability report. Di luar itu, kita juga bekerja sama dengan pihak akademisi. Tujuannya mengawal proses pembuatan sustainability report PT ABC... Di setiap akhir dari laporan atau penyampaian sustainability report, kita biasanya akan melakukan semacam review bersama. Review bersama ini tujuannya adalah untuk melakukan perbaikan di pelaporan sustainability report tahun berikutnya... Jadi, di luar dari keharusan, PT ABC selalu berusaha untuk melakukan perbaikan sesuai dengan roadmap dari net zero emission yang kami sudah sepakati dan ada komitmen sejak tahun 2020.” (Narasumber, 2025)

PT ABC tidak mendapatkan skor penuh (skor 22) pada pertanyaan Level 1. PT ABC mendapatkan skor 21 atau mematuhi 95% pengungkapan aspek keberlanjutan pada Level 1. Hasil ini menunjukkan bahwa pengungkapan yang dilakukan perusahaan belum sepenuhnya mematuhi pengungkapan minimum (Level 1) sesuai ACGS Bagian B. Hasil ini selaras dengan hasil penelitian dari Harahap et al. (2020). Hasil penelitian Harahap et al. (2020) tersebut menyatakan bahwa perusahaan pertambangan di Indonesia tidak sepenuhnya memenuhi pengungkapan minimum berdasarkan standar pelaporan keberlanjutan. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa perusahaan pertambangan hanya memenuhi kurang dari 85% pengungkapan minimum. Sementara itu, hasil penelitian ini menunjukkan pemenuhan pengungkapan minimum sebesar 95% pada PT ABC. Hasil penelitian ini dan penelitian Harahap et al. (2020) menunjukkan kurangnya pengungkapan aspek keberlanjutan di laporan tahunan atau laporan keberlanjutan oleh perusahaan pertambangan di Indonesia.

Penyebab Ketidakesesuaian Pengungkapan Aspek Keberlanjutan pada PT ABC

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT ABC tidak melakukan pengungkapan aspek keberlanjutan sesuai ACGS Bagian B pada dua pertanyaan yang disajikan pada tabel 2.

Tabel 2. Ketidaksesuaian Pengungkapan Keberlanjutan PT ABC

ACGS Questions	Gap/Discrepancy
B.6.3 - Apakah perusahaan memiliki kebijakan penghargaan/kompensasi yang memperhitungkan kinerja perusahaan di luar ukuran keuangan jangka pendek?	• Tidak terdapat pengungkapan terkait kompensasi jangka panjang berbasis kinerja yang berlaku bagi seluruh karyawan • Kompensasi yang berlaku bagi seluruh karyawan PT ABC hanya berdasarkan kinerja tahunan karyawan, bukan kinerja jangka panjang
(P).B.1.1 - Apakah pernah terjadi pelanggaran hukum terkait tenaga kerja/ ketenagakerjaan/ konsumen/ kepailitan/ komersial/ persaingan atau masalah lingkungan?	Terdapat perkara hukum, yaitu kasus korupsi terkait ketidaksesuaian kualitas dengan harga produk yang merugikan konsumen

Sumber: Data sekunder dan hasil wawancara diolah peneliti berdasarkan ASEAN Corporate Governance Scorecard

Tidak terpenuhinya pengungkapan ideal pada level 1 disebabkan karena adanya kurang pengungkapan pada pertanyaan B.6.3. Pada pertanyaan B.6.3, PT ABC memperoleh skor 0. Hal ini disebabkan karena PT ABC mengungkapkan bahwa PT ABC tidak memiliki kebijakan kompensasi berbasis kinerja non-finansial atau kinerja jangka panjang. Hasil wawancara menunjukkan bahwa PT ABC sebenarnya memiliki kebijakan kompensasi (bonus atau insentif) berdasarkan kinerja keberlanjutan jangka pendek (pemenuhan 2 KPI keberlanjutan). Namun, penghargaan tersebut hanya diberikan untuk level Manajer sampai Direksi. Informasi terkait adanya penghargaan berdasarkan kinerja keberlanjutan tidak diungkapkan pada laporan tahunan maupun laporan keberlanjutan karena informasi tersebut bersifat sensitif. Hal ini mencerminkan sikap perusahaan untuk melakukan pengungkapan secara selektif (selective disclosure).

Hasil wawancara juga menjelaskan alasan lainnya kurangnya pengungkapan pada pertanyaan B.6.3, yaitu tidak terdapat regulasi yang secara spesifik mewajibkan PT ABC untuk mengungkapkan informasi tersebut. Regulasi yang mengatur mengenai pengungkapan kompensasi pada perusahaan di Indonesia hanya mengatur terkait pengungkapan skema kompensasi untuk Direksi dan Dewan Komisaris, tidak sampai kepada skema kompensasi untuk seluruh karyawan. Contohnya: pasal 29 pada POJK Nomor 33 /POJK.04/2021 mengatur evaluasi kinerja yang mencakup aspek kuantitatif (keuangan) dan kualitatif (non-keuangan atau pencapaian strategi jangka panjang) sebagai dasar penetapan remunerasi bagi

Direksi dan Dewan Komisaris. Hal ini menunjukkan bahwa ketidakpatuhan disebabkan karena tidak adanya celah pada regulasi yang tidak secara spesifik mengatur pengungkapan tersebut (terdapat regulatory gap). Selain itu, ketidakpatuhan terhadap pengungkapan terkait kompensasi tersebut mencerminkan tidak adanya faktor eksternal (regulasi) yang mendorong PT ABC untuk mengungkapkan informasi tersebut (ketidakpatuhan bersifat instrumental non-compliance).

Tidak terpenuhinya pengungkapan ideal pada level 2 disebabkan karena adanya penalti berupa skor -1 yang diperoleh oleh PT ABC pada pertanyaan (P)B.1.1. Penalti tersebut ini disebabkan karena adanya pelanggaran hukum, yaitu kasus korupsi yang merugikan konsumen PT ABC. Kasus tersebut disebabkan oleh tindakan oknum karyawan PT ABC dan anak perusahaan PT ABC. Pelanggaran tersebut mencerminkan praktik tata kelola yang buruk di PT ABC. Selain itu, pelanggaran tersebut juga menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tata kelola. Pelanggaran prinsip transparansi ditunjukkan dari tidak mengungkapkan informasi produk dengan akurat. Kasus tersebut juga menunjukkan kegagalan perusahaan dalam melakukan pengawasan mutu produk. Hal ini menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip akuntabilitas. Selain itu, penjualan produk kepada konsumen dengan harga yang lebih tinggi dari kualitas yang dijanjikan menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip fairness. Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat dua penyebab utama pengungkapan aspek keberlanjutan yang dilakukan oleh PT ABC tidak mematuhi dengan pengungkapan ideal berdasarkan ACGS Bagian B. Penyebab pertama adalah tidak adanya regulasi di Indonesia yang secara spesifik mewajibkan pengungkapan informasi tersebut. PT ABC hanya mengungkapkan informasi yang wajib diungkapkan berdasarkan regulasi yang berlaku di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa pengungkapan aspek keberlanjutan di PT ABC disebabkan karena faktor eksternal, yaitu adanya kewajiban pengungkapan dari regulasi yang berlaku di Indonesia.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengungkapan aspek keberlanjutan PT ABC dilakukan sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi di Indonesia. Kepatuhan tersebut dilakukan karena adanya pengaruh dari regulasi di Indonesia dan sebagai upaya menghindari hukuman jika PT ABC tidak mematuhi regulasi tersebut. Kepatuhan tersebut sesuai dengan proses pertama dari tiga proses perubahan perilaku menurut Kelman (1958). Kepatuhan tersebut hanya bersifat sementara dan terjadi jika terdapat pengawasan dan sanksi ketidakpatuhan diberikan oleh regulator. Kepatuhan PT ABC belum sampai pada proses internalisasi, yaitu proses adopsi sikap dan perilaku karena adanya keselarasan dengan nilai-nilai perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan kepatuhan PT ABC terhadap regulasi terkait pengungkapan aspek keberlanjutan di Indonesia. Kepatuhan tersebut tergolong sebagai kepatuhan berdasarkan perspektif instrumen (Tyler, 2006). Kepatuhan tersebut timbul sebagai tanggapan dari tekanan dari eksternal (regulasi di Indonesia). Kepatuhan tersebut tidak berasal dari internal perusahaan, seperti keselarasan nilai-nilai perusahaan. Hal ini didukung dengan hasil wawancara yang menunjukkan bahwa PT ABC memiliki informasi yang harus diungkapkan, namun tidak mengungkapkannya kepada publik. Pengungkapan aspek keberlanjutan menjadi upaya minimum untuk menghindari sanksi jika tidak mengungkapkan informasi yang wajib diungkapkan oleh regulasi di Indonesia. Pengungkapan aspek keberlanjutan dilakukan oleh PT ABC setelah adanya regulasi yang mewajibkan oleh

pengungkapan tersebut. Pengungkapan tersebut dapat ditingkatkan dengan meningkatkan sanksi atas ketidakpatuhan.

“Betul. Sejauh ini, PT ABC seperti itu [informasi yang belum mandatory akan dipublikasikan untuk pelaporan periode berikutnya kalau informasinya sudah mandatory].” (Narasumber, 2025)

Penyebab kedua pengungkapan aspek keberlanjutan yang dilakukan oleh PT ABC tidak mematuhi dengan pengungkapan ideal berdasarkan ACGS Bagian B adalah informasi yang diungkapkan merupakan commercially sensitive information. Informasi tersebut terkait dengan strategi dan proses bisnis yang dilakukan oleh perusahaan. Pengungkapan informasi tersebut memengaruhi bisnis perusahaan. Selain itu, pengungkapan informasi yang bersifat sensitif secara komersial tidak dapat dilakukan karena pengungkapan informasi sensitif di PT ABC dikategorikan sebagai upaya mempublikasikan rahasia perusahaan. Tindakan perusahaan untuk tidak mempublikasikan informasi sensitif mencerminkan upaya perusahaan untuk melakukan seleksi terhadap informasi yang diungkapkan (selective disclosure). Upaya seleksi tersebut disebabkan karena pertimbangan biaya dan manfaat (cost and benefit) dari mengungkapkan informasi tersebut. Jika pengungkapan dilakukan, perusahaan menilai pengungkapan tersebut menimbulkan lebih banyak dampak negatif daripada dampak positif bagi perusahaan.

Karena kami melihat masih belum ada kebutuhan secara mandatory PT ABC harus mempublikasikan. Commercially sensitive adalah isunya... Itulah sebabnya karena kaitannya erat sekali dengan proses bisnis yang sedang berjalan karena informasi-informasi seperti yang tadi ingin digali itu tidak terlihat dalam laporan yang dipublikasikan dan hanya ada secara parsial. Sebenarnya ada [informasi tersebut]. Jadi, di PT ABC, kenapa laporannya tidak dipublikasikan, kenapa yang disampaikan secukupnya, karena memang kebutuhannya seperti itu. Kita tidak bisa keluar dari keinginannya regulator, aturan yang disampaikan di regulator dalam mempublikasikan suatu informasi. Publikasi terhadap informasi yang tidak mandatory atau diharuskan pun dianggap sebagai salah satu tindakan yang membocorkan rahasia perusahaan.” (Narasumber, 2025)

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa PT ABC melakukan pengungkapan aspek keberlanjutan sebagai upaya untuk memperoleh legitimasi dari para pemangku kepentingan. Hal ini menunjukkan bahwa legitimasi atas operasional perusahaan menjadi salah satu motivasi perusahaan untuk mengungkapkan informasi terkait kinerja keberlanjutan perusahaan (Deegan, 2002). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa legitimasi yang diperoleh PT ABC dari pengungkapan aspek keberlanjutan merupakan perpaduan antara bentuk legitimasi pragmatis dan legitimasi kognitif. Kedua bentuk legitimasi tersebut saling terkait dan saling menguatkan satu sama lainnya. Pengungkapan aspek keberlanjutan pada laporan keberlanjutan dan laporan lainnya yang dapat diakses oleh publik merupakan upaya perusahaan untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan, terutama investor. Hal ini mencerminkan upaya PT ABC memperoleh legitimasi pragmatis (influence) melalui tindakan untuk kepentingan mayoritas audiens (O'Dwyer et al., 2011; Suchman, 1995). Selain memberikan informasi terkait kebijakan dan kinerja keberlanjutan perusahaan kepada para pemangku kepentingan, PT ABC juga menggunakan laporan keberlanjutan untuk memenuhi kebutuhan informasi dari investor PT ABC. Penyajian

informasi pada laporan keberlanjutan PT ABC disesuaikan dengan informasi yang dibutuhkan oleh investor sebagai pengguna laporan keberlanjutan PT ABC.

“Informasi yang ada di laporan mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan informasi dari stakeholder... Artinya memang ada spesifik kebutuhan dari investornya PT ABC untuk informasi-informasi yang disajikan itu lebih ke arah yang sekarang tersedia di Sustainability Report... Jadi, secara proporsi sebenarnya tujuan utamanya kepada investor, tetapi secara faktual saat ini memang digunakan untuk banyak hal, terutama terkait isu-isu sosial dan isu governance.” (Narasumber, 2025)

PT ABC mengungkapkan aspek keberlanjutan untuk membangun legitimasi perusahaan di masyarakat dengan cara menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap isu keberlanjutan, termasuk isu lingkungan. Pengungkapan yang dilakukan perusahaan terkait pertanyaan ACGS pada bagian B.2, B.4, B.5, dan B.6 menunjukkan kepedulian PT ABC terhadap kebutuhan dan kekhawatiran dari para pemangku kepentingan. Kepedulian tersebut ditunjukkan melalui kebijakan, program dan tindakan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan karyawan dan masyarakat. Pengungkapan kebijakan, program, dan tindakan tersebut menunjukkan bahwa PT ABC tidak hanya beroperasi untuk mencari laba, namun juga bertindak untuk kepentingan karyawan dan masyarakat. Pengungkapan aspek keberlanjutan oleh PT ABC menjadi salah satu cara untuk memperoleh pengakuan dan kepercayaan dari para pemangku kepentingan, seperti karyawan dan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pengungkapan aspek keberlanjutan merupakan upaya PT ABC untuk membangun legitimasi perusahaan. Legitimasi tersebut merupakan kognitif berdasarkan pemahaman (Suchman, 1995). Legitimasi tersebut diperoleh dari pemahaman dan penerimaan masyarakat atas aktivitas operasional PT ABC di wilayah operasional perusahaan.

“Sebenarnya ada kebutuhan PT ABC untuk menginformasikan kepada masyarakat yang ada di Indonesia bahwa PT ABC itu juga peduli terhadap lingkungannya, seperti konsep-konsepnya SDG.” (Narasumber, 2025).

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa PT ABC mematuhi sebagian besar pengungkapan aspek keberlanjutan berdasarkan pada ACGS Bagian B – Keberlanjutan dan Ketahanan. PT ABC mendapatkan skor 27 (mematuhi 93% dari seluruh pengungkapan pada ACGS Bagian B). PT ABC memenuhi pengungkapan aspek keberlanjutan pada 21 pertanyaan di Level 1, 7 pertanyaan bonus dan 2 pertanyaan penalti di Level 2. Skor ini menunjukkan bahwa PT ABC telah melakukan pengungkapan aspek keberlanjutan dengan baik sesuai ACGS. Perbedaan antara pengungkapan aspek keberlanjutan yang telah dilakukan oleh PT ABC dan pengungkapan ideal berdasarkan ACGS Bagian B terdapat pada 2 pertanyaan, yang terdiri dari 1 pertanyaan di Level 1, dan 1 pertanyaan penalti di Level 2. Perbedaan tersebut disebabkan karena regulasi yang berlaku di Indonesia tidak mewajibkan pengungkapan informasi tersebut. Selain itu, informasi yang tidak diungkapkan tersebut merupakan informasi yang bersifat commercially sensitive.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Penelitian ini menggunakan ACGS Bagian B untuk menilai pengungkapan aspek keberlanjutan pada satu perusahaan pertambangan di Indonesia (PT ABC). Hasil penelitian hanya terbatas dari analisis menggunakan data sekunder yang dapat diakses oleh publik, terutama laporan tahunan dan

laporan keberlanjutan tahun 2024, dan data primer dari wawancara dengan satu narasumber. Penelitian selanjutnya dapat dikembangkan dari keterbatasan tersebut. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan unit analisis pada perusahaan lain di sektor pertambangan atau sektor lainnya. Penelitian selanjutnya juga dapat membandingkan antara pengungkapan aspek keberlanjutan sebelum dan setelah perusahaan menggunakan ACGS Bagian B (versi 2024) untuk menganalisis perbedaan pengungkapan setelah adanya perubahan komponen penilaian tata kelola dan bagaimana ACGS dapat memengaruhi pengungkapan aspek keberlanjutan yang dilakukan oleh perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- ACGA. (2023). *CG Watch 2023*. <https://www.acga-asia.org/cgwatch-detail.php?id=482>
- ACMF. (2022). *ASEAN Corporate Governance 2021 Awards*. https://www.theacmf.org/images/downloads/pdf/2021_ACGS_Regional_Awards_Booklet_30Sep24.pdf
- ACMF. (2024). *2024 ASEAN Corporate Governance Scorecard*. [https://www.theacmf.org/images/downloads/pdf/ACGS_version_2_revised0324\(200324\).pdf](https://www.theacmf.org/images/downloads/pdf/ACGS_version_2_revised0324(200324).pdf)
- Apsari, P. D., & Puspita, A. F. (2023). Analisis penerapan ASEAN corporate governance scorecard pada PT XI Axiata Tbk periode 2020-2022. *Reviu Akuntansi, Keuangan Dan Sistem Informasi*, 2(4). doi:10.21776/reaksi.2023.2.4.240
- Apsari, P. D., & Puspita, A. F. (2023). Analisis penerapan ASEAN corporate governance scorecard pada PT XI Axiata Tbk periode 2020-2022. *Reviu Akuntansi, Keuangan Dan Sistem Informasi*, 2(4). doi:10.21776/reaksi.2023.2.4.240
- Barbier, E. B. (1987). The Concept of Sustainable Economic Development. *Environmental Conservation*, 14(2), 101–110. <http://www.jstor.org/stable/44519759>
- Barbier, E. B. (1987). The Concept of Sustainable Economic Development. *Environmental Conservation*, 14(2), 101–110. <http://www.jstor.org/stable/44519759>
- Buchetti, B., Arduino, F. R., & Perdichizzi, S. (2024). A literature review on corporate governance and ESG research: Emerging trends and future directions. *International Review of Financial Analysis*, 103759. doi:10.1016/j.irfa.2024.103759
- Buchetti, B., Arduino, F. R., & Perdichizzi, S. (2024). A literature review on corporate governance and ESG research: Emerging trends and future directions. *International Review of Financial Analysis*, 103759. doi:10.1016/j.irfa.2024.103759
- Caronge, E., Rasyid, S., & Pagalung, G. (2023). Influence of ASEAN corporate governance scorecard (ACGS) and financial performance on company value using sustainability reporting mediation. *International Journal Of All Research Writings*, 5(4), 9–22.
- Caronge, E., Rasyid, S., & Pagalung, G. (2023). Influence of ASEAN corporate governance scorecard (ACGS) and financial performance on company value using sustainability reporting mediation. *International Journal Of All Research Writings*, 5(4), 9–22.
- Correa-Mejía, D. A., García-Benau, M. A., & Correa-García, J. A. (2024). The critical role of corporate governance in sustainable development goals prioritisation: A 5 P s-based analysis for emerging economies. *Heliyon*, 10(3). doi:10.1016/j.heliyon.2024.e25480
- Correa-Mejía, D. A., García-Benau, M. A., & Correa-García, J. A. (2024). The critical role of corporate governance in sustainable development goals prioritisation: A 5 P s-based analysis for emerging economies. *Heliyon*, 10(3). doi:10.1016/j.heliyon.2024.e25480

- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Sage Publications.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Sage Publications.
- Deegan, C. (2002). Introduction: The legitimising effect of social and environmental disclosures—a theoretical foundation. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 15(3), 282–311. doi:10.1108/09513570210435852
- Deegan, C. (2002). Introduction: The legitimising effect of social and environmental disclosures—a theoretical foundation. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 15(3), 282–311. doi:10.1108/09513570210435852
- Disyon, H., Widianingsih, W., & Rio, F. (2022). Corporate Social and Environmental Responsibility in SOE Mining Sector in Indonesia: Commitment of Social-Legal Awareness. *JSW (Jurnal Sosiologi Walisongo)*, 6(2), 159–172. doi:10.21580/jsw.2022.6.2.12423
- Disyon, H., Widianingsih, W., & Rio, F. (2022). Corporate Social and Environmental Responsibility in SOE Mining Sector in Indonesia: Commitment of Social-Legal Awareness. *JSW (Jurnal Sosiologi Walisongo)*, 6(2), 159–172. doi:10.21580/jsw.2022.6.2.12423
- Ellet, W. (2018). *The case study handbook: A student's guide* (Revised). Harvard Business School Publishing.
- Ellet, W. (2018). *The case study handbook: A student's guide* (Revised). Harvard Business School Publishing.
- Gregory, H. J., & Simms, M. E. (1999). Corporate governance: what it is and why it matters. 9th International Anti-Corruption Conference, 10, 15.
- Gregory, H. J., & Simms, M. E. (1999). Corporate governance: what it is and why it matters. 9th International Anti-Corruption Conference, 10, 15.
- Hamonangan, F. R., & Hermawan, A. A. (2020). Analysis Of The Implementation Of Good Corporate Governance Based On Asean Corporate Governance Scorecard: Case Study Pt Jakarta Propertindo. *Dinasti International Journal of Education Management and Social Science (DIJEMSS)*, 1(4), 580–601.
- Hamonangan, F. R., & Hermawan, A. A. (2020). Analysis Of The Implementation Of Good Corporate Governance Based On Asean Corporate Governance Scorecard: Case Study Pt Jakarta Propertindo. *Dinasti International Journal of Education Management and Social Science (DIJEMSS)*, 1(4), 580–601.
- Harahap, R., Makaryanawati, E. R., & Furqorina, R. (2020). Sustainability Reporting of Indonesian Mining Companies: How Compliant Are They? *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, 23(1), 172–181. doi:10.13106/jafeb.2020.vol7.no11.315
- Harahap, R., Makaryanawati, E. R., & Furqorina, R. (2020). Sustainability Reporting of Indonesian Mining Companies: How Compliant Are They? *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, 23(1), 172–181. doi:10.13106/jafeb.2020.vol7.no11.315

- Husnaini, W., & Basuki, B. (2020). ASEAN corporate governance scorecard: sustainability reporting and firm value. *The Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(11), 315–326. doi:10.1007/s10551-016-3099-5
- Husnaini, W., & Basuki, B. (2020). ASEAN corporate governance scorecard: sustainability reporting and firm value. *The Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(11), 315–326. doi:10.1007/s10551-016-3099-5
- Hussain, N., Rigoni, U., & Orij, R. P. (2018). Corporate governance and sustainability performance: Analysis of triple bottom line performance. *Journal of Business Ethics*, 149, 411–432. doi:10.1007/s10551-016-3099-5
- Hussain, N., Rigoni, U., & Orij, R. P. (2018). Corporate governance and sustainability performance: Analysis of triple bottom line performance. *Journal of Business Ethics*, 149, 411–432. doi:10.1007/s10551-016-3099-5
- Ilyasa, R., & Nurkholis, N. (2023). The Implementation of Asean Corporate Governance Scorecard on the Consumer Goods Industry: The Case of PT Unilever Indonesia Tbk. and PT Indofood Sukses Makmur Tbk. *JASa (Jurnal Akuntansi, Audit Dan Sistem Informasi Akuntansi)*, 7(3), 421–432. doi:10.36555/jasa.v7i3.2210
- Ilyasa, R., & Nurkholis, N. (2023). The Implementation of Asean Corporate Governance Scorecard on the Consumer Goods Industry: The Case of PT Unilever Indonesia Tbk. and PT Indofood Sukses Makmur Tbk. *JASa (Jurnal Akuntansi, Audit Dan Sistem Informasi Akuntansi)*, 7(3), 421–432. doi:10.36555/jasa.v7i3.2210
- Imperatives, S. (1987). Report of the World Commission on Environment and Development: Our common future. Accessed Feb, 10(42,427).
- Imperatives, S. (1987). Report of the World Commission on Environment and Development: Our common future. Accessed Feb, 10(42,427).
- Karina, J., & Weli, W. (2020). Evaluasi Kepatuhan Good Corporate Governance Terhadap Asean Corporate Governance Studi Pada Consumer Goods Industry Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *AJAR*, 3(01), 114–132. doi:10.35129/ajar.v3i01.109
- Karina, J., & Weli, W. (2020). Evaluasi Kepatuhan Good Corporate Governance Terhadap Asean Corporate Governance Studi Pada Consumer Goods Industry Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *AJAR*, 3(01), 114–132. doi:10.35129/ajar.v3i01.109
- Kelman, H. C. (1958). Compliance, identification, and internalization three processes of attitude change. *Journal of Conflict Resolution*, 2(1), 51–60. doi:10.1177/002200275800200106
- Kelman, H. C. (1958). Compliance, identification, and internalization three processes of attitude change. *Journal of Conflict Resolution*, 2(1), 51–60. doi:10.1177/002200275800200106
- Leal Filho, W., Platje, J., Gerstlberger, W., Ciegis, R., Kääriä, J., Klavins, M., & Kliucininkas, L. (2016). The role of governance in realising the transition towards sustainable societies. *Journal of Cleaner Production*, 113, 755–766. doi:10.1016/j.jclepro.2015.11.060
- Leal Filho, W., Platje, J., Gerstlberger, W., Ciegis, R., Kääriä, J., Klavins, M., & Kliucininkas, L. (2016). The role of governance in realising the transition towards sustainable societies. *Journal of Cleaner Production*, 113, 755–766. doi:10.1016/j.jclepro.2015.11.060

- Mahmood, Z., Kouser, R., Ali, W., Ahmad, Z., & Salman, T. (2018). Does corporate governance affect sustainability disclosure? A mixed methods study. *Sustainability*, 10(1), 207. doi:10.3390/su10010207
- Mahmood, Z., Kouser, R., Ali, W., Ahmad, Z., & Salman, T. (2018). Does corporate governance affect sustainability disclosure? A mixed methods study. *Sustainability*, 10(1), 207. doi:10.3390/su10010207
- Mahmudah, H., Yustina, A. I., Dewi, C. N., & Sutopo, B. (2023). Voluntary disclosure and firm value: Evidence from Indonesia. *Cogent Business & Management*, 10(1), 2182625. doi:10.1080/23311975.2023.2182625
- Mahmudah, H., Yustina, A. I., Dewi, C. N., & Sutopo, B. (2023). Voluntary disclosure and firm value: Evidence from Indonesia. *Cogent Business & Management*, 10(1), 2182625. doi:10.1080/23311975.2023.2182625
- Milgram, S. (1963). Behavioral study of obedience. *The Journal of Abnormal and Social Psychology*, 67(4), 371. doi: 10.1037/h0040525
- Milgram, S. (1963). Behavioral study of obedience. *The Journal of Abnormal and Social Psychology*, 67(4), 371. doi: 10.1037/h0040525
- O'Dwyer, B., Owen, D., & Unerman, J. (2011). Seeking legitimacy for new assurance forms: The case of assurance on sustainability reporting. *Accounting, Organizations and Society*, 36(1), 31–52. doi:10.1016/j.aos.2011.01.002
- O'Dwyer, B., Owen, D., & Unerman, J. (2011). Seeking legitimacy for new assurance forms: The case of assurance on sustainability reporting. *Accounting, Organizations and Society*, 36(1), 31–52. doi:10.1016/j.aos.2011.01.002
- OECD. (2015). G20/OECD principles of corporate governance. OECD Publishing.
- OECD. (2015). G20/OECD principles of corporate governance. OECD Publishing.
- OECD. (2023). G20/OECD Principles of Corporate Governance 2023. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/ed750b30-en>
- OECD. (2023). G20/OECD Principles of Corporate Governance 2023. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/ed750b30-en>
- OJK. (2014). Roadmap tata kelola perusahaan Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan.
- OJK. (2014). Roadmap tata kelola perusahaan Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan.
- Panangian, A. A. G., & Sudarma, M. (2022). Analisis Implementasi Kriteria Asean Corporate Governance Scorecard Pada Pt. Lippo Karawaci, Tbk. *Reviu Akuntansi, Keuangan, Dan Sistem Informasi*, 1(1), 110–121. doi:10.21776/reaksi.2022.1.1.10
- Panangian, A. A. G., & Sudarma, M. (2022). Analisis Implementasi Kriteria Asean Corporate Governance Scorecard Pada Pt. Lippo Karawaci, Tbk. *Reviu Akuntansi, Keuangan, Dan Sistem Informasi*, 1(1), 110–121. doi:10.21776/reaksi.2022.1.1.10
- PEFA. (2023). 2022 Stocktaking of PFM diagnostic tools: Global trends and insights volume 2.
- PEFA. (2023). 2022 Stocktaking of PFM diagnostic tools: Global trends and insights volume 2.
- Principles, I. G. G. (2021). Published by the International Corporate Governance Network. Saffron House. London EC1N 8TS UK.
- Principles, I. G. G. (2021). Published by the International Corporate Governance Network. Saffron House. London EC1N 8TS UK.

- Purvis, B., Mao, Y., & Robinson, D. (2019). Three pillars of sustainability: in search of conceptual origins. *Sustainability Science*, 14, 681–695. doi:10.1007/s11625-018-ACGA. (2023). CG watch 2023. <https://www.acga-asia.org/cgwatch-detail.php?id=482>
- Purvis, B., Mao, Y., & Robinson, D. (2019). Three pillars of sustainability: in search of conceptual origins. *Sustainability Science*, 14, 681–695. doi:10.1007/s11625-018-0627-5
- Purwanti, M., & Lestari, Y. D. (2021). Praktik Pengungkapan Sustainability Report dan Environmental Incidents: Studi pada Sustainability Report Perusahaan BUMN PT. Pertamina (Persero) Tahun 2017-2018. *Portofolio: Jurnal Ekonomi, Bisnis, Manajemen, Dan Akuntansi*, 18(1), 84–100. doi:10.26874/portofolio.v18i1.211
- Ramadhani, R., Rasyid, E. R., & Fontanella, A. (2021). Motivasi pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 4(2), 105–117. doi:10.35446/akuntansikompetif.v4i2.667
- Saunders, M. N. K., Lewis, P., & Thornhill, A. (2019). *Research Methods for Business Students* (8th ed.). Pearson.
- Shahid, M. S., & Abbas, M. (2019). Does corporate governance play any role in investor confidence, corporate investment decisions relationship? Evidence from Pakistan and India. *Journal of Economics and Business*, 105, 105839. <https://doi.org/10.1016/J.JECONBUS.2019.03.003>
- Solikhah, B., Puteri, A. A., Sarwono, E., Ulupui, I., & Al-Faryan, M. A. S. (2021). Improving understanding on determinant of environmental disclosure and moderating effect of corporate governance. Solikhah, B., Puteri, AA, Sarwono, E., Ulupui, I GKA, & Al-Faryan, MAS (2021). Improving Understanding on Determinant of Environmental Disclosure and Moderating Effect of Corporate Governance. *Academy of Strategic Management Journal*, 20(2). <https://ssrn.com/abstract=3855842>
- Suchman, M. C. (1995). Managing legitimacy: Strategic and institutional approaches. *Academy of Management Review*, 20(3), 571–610. doi:10.2307/258788
- Tyler, T. R. (2006). *Why people obey the law*. Princeton university press.
- UN General Assembly. (2022). Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development, A/RES/70/1, 21 October 2015. <https://sdgs.un.org/2030agenda>
- UNDP and UN Environment. (2018). *Managing mining for sustainable development: A sourcebook*. United Nations Development Programme.
- Widiastuti, H., Utami, E. R., & Handoko, R. (2018). Pengaruh ukuran perusahaan, tipe industri, growth, dan media exposure terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (studi empiris pada perusahaan yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2014-2015). *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 3(2), 107–117. doi:10.23917/reaksi.v3i2.6745
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). Sage Publications.